

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT , atas Rahma, Taufik, Hidayah dan Inayah – Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dan regulasi yang ada.

Adapun maksud dokumen LKJiP ini untuk memberikan laporan yang terkait dengan capaian kinerja dari Bappeda dan sebagai bahan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2025. Tujuan dokumen LKJiP memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan kepada para stakeholder yang membutuhkan dan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi atas tereselsainya LKJiP khususnya di BAPPELITBANGDA. Namun disisi lain kami menyadari dari apa yang telah selesaikan ini masih perlu adanya masukan dan saran guna sebagai koreksi untuk perbaikan laporan mendatang.

Pasuruan, 31 Desember 2025



KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dalam memberikan pelayanan publik. Laporan kinerja juga merupakan proses penilaian yang terukur dan menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan implementasi manajemen strategis sektor public secara formal diperkenalkan tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan di dalam rencana strategis organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan. Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan 4 misi dan BAPPERIDA sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mendukung pencapaian RPJMD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 ini merupakan capaian tahun kedua dalam periode jangka menengah tahun 2024-2026 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Laporan kinerja ini bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026 dan Rencana Startegis BAPPERIDA Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 beserta perubahannya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Tahun 2025:

1. Memberikan informasi kinerja tahun 2025 yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mengevaluasi kinerja Bappelitbangda sebagai dasar perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

I.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasuruan

A. Tugas dan Fungsi

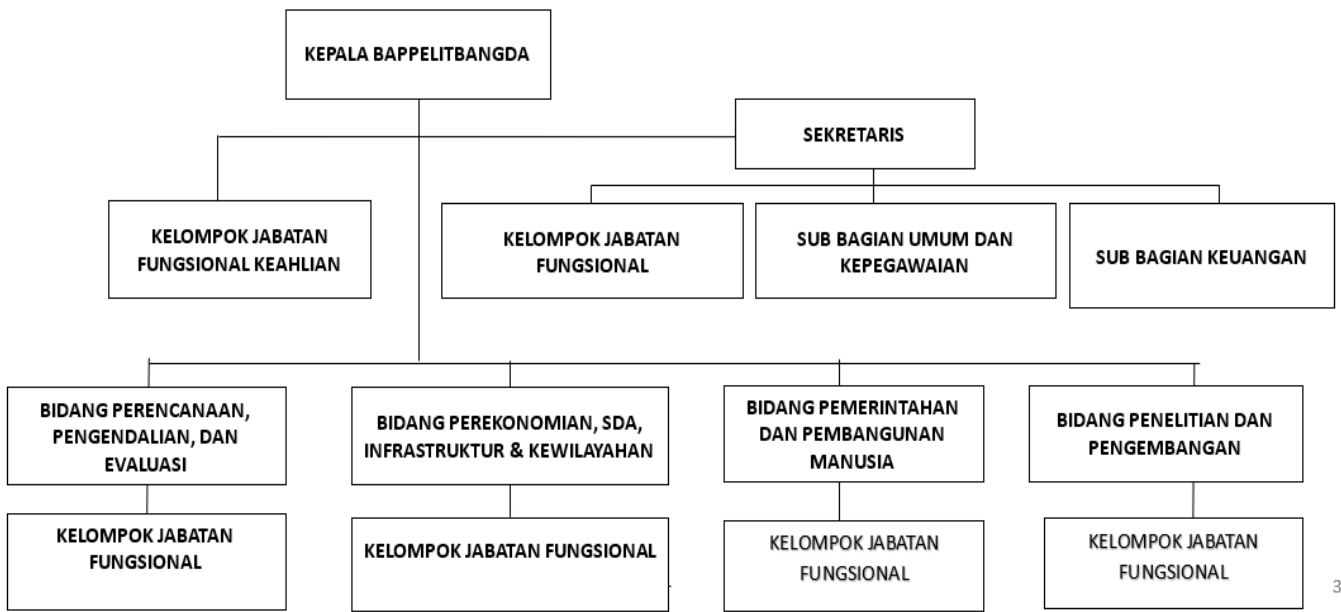
Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan.

Tugas Bappelitbangda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan. Bagan struktur organisasi Bappelitbangda sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

C. Kepegawaian, Sarana dan Prasarana

Jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebanyak 43 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 29 orang, PPPK sebanyak 14 orang, Rincian ASN Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Bappelitbangda Kab. Pasuruan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	1
2	S2	10
3	S1	20
4	D3	2
5	SMA	10
Jumlah		43

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kab. Pasuruan Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang kinerja. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasaran yang dimiliki setiap tahun dilakukan pemeliharaan, pengadaan dan perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Kondisi saran dan prasarana di uraikan pada tabel 2.3.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak
1	Kendaraan Dinas (mobil)	10 unit	10 unit	-
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	14 unit	14 unit	-
3	Komputer	48 unit	48 unit	-
4	Laptop	36 unit	36 unit	-
5	Netbook	5 unit	5 unit	-
6	Printer	61 unit	61 unit	-
7	Plotter	1 unit	1 unit	-
8	Scanner	1 unit	1 unit	-
9	UPS	26 unit	26 unit	-
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit	3 unit	-
11	Meja Rapat	22 buah	22 buah	-
12	Kursi Rapat	158 buah	158 buah	-
13	Kursi Tamu	4 buah	4 buah	-
14	Meja Tamu	1 unit	1 unit	-

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak
15	Kursi Putar	2 buah	2 buah	-
16	Meja Biro	5 buah	5 buah	-
17	Meja Komputer	12 buah	12 buah	-
18	Sofa	4 unit	4 unit	-
19	Kursi Kerja	75 unit	75 unit	-
20	Meja Kerja	53 buah	53 buah	-
21	Brankas	3 buah	3 buah	-
22	Kamera	10 unit	10 unit	-
23	LCD Proyektor	9 unit	2 unit	7 unit
24	Layar Proyektor	2 unit	2 unit	-
25	Microphone	1 unit	1 unit	-
26	Telepon	30 unit	30 unit	-
27	Mesin Faksimile	4 unit	4 unit	-
28	Televisi	1 buah	1 buah	-
29	Air fryer	7 buah	7 buah	-
30	Sound sistem	1 paket	1 paket	-
31	Wireless	1 buah	1 buah	-
32	Handycam	5 buah	5 buah	-
33	GPS	5 unit	5 unit	-
34	Air Conditioner	36 unit	36 unit	-
35	Mesin Fotokopi	1 unit	1 unit	-
36	Lemari Besi	13 buah	13 buah	-
37	Rak Kayu	16 buah	16 buah	-
38	Filling Besi/Metal	16 buah	16 buah	-
39	Lemari Kaca	2 buah	2 buah	-
40	Lemari Kayu	14 buah	14 buah	-
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah	5 buah	-
42	Lemari Peta	1 buah	1 buah	-
43	Papan Visuil	1 buah	1 buah	-
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah	3 buah	-
45	Papan Pengumuman	14 buah	14 buah	-
46	Mesin Absensi	1 buah	1 buah	-
47	Papan Panel	1 buah	1 buah	-

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2025

Tabel 1.3
 Prasarana Gedung Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Sekretariat	1	Ruang
6	Ruang Gudang	1	Ruang
7	Loby	1	Ruang
8	Musholla	2	Ruang
9	Dapur kering	3	Ruang
10	Dapur basah	1	Ruang
11	Toilet / Kamar Mandi	3	Ruang

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025

1.4 Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan diantisipasi dalam jangka menengah. Identifikasi permasalahan dan isu strategis tersebut sebagaimana tabel Tabel 1.4.

Tabel 1.4
 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Jangka Menengah
 Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan Koordinasi belum bisa optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik	Belum menerapkan perencanaan dengan menggunakan metode THIS	• Belum optimalnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah • Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah • Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial
2.	Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah	Data dan Informasi yang belum tervalidasi	Belum optimalnya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
3.	Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan keputusan.	Hasil – hasil penelitian yang dikaitkan dengan pembangunan di Kabupaten pasuruan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan	Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
4.	Inovasi Daerah belum dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup	Hasil inovasi masih belum menunjukkan kenaikan signifikan terhadap pelayanan public, maupun memberikan manfaat	Penciptaan, penerapan dan pengembangan inovasi daerah terus dilakukan diantaranya melalui kompetisi ide gagasan inovasi sebagai langkah awal dalam mendorong terciptanya inisiatif inovasi daerah,

1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nonor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekananan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu jangka menengah dengan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

2.1 Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026 Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. pada tujuan **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi** dengan dasaran **Meningkatnya Birokrasi yag bersih dan Akuntabel**

Adapun ringkasan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025	2026
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,92	25,30	25,69
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,82	25,11	25,40
Sasaran :				
1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100
	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	100	100	100
	Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target (%)	36,80	36,50	36,00
	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah (%)	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025	2026
2. Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Tingkat keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD (%)	100	100	100
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	87	88

2.2 Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2025-2029.

Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah Adapun Ringkasan Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA 2025-2029 di uraikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,04	25,3	25,69	25,72	25,79	25,84	25,89
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	23,97	25,11	25,4	25,45	25,5	25,5	25,6
	Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	80	100	100	100	100	100	100
SASARAN 1 : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,36	97	98	100	100	100	100

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	97,50	98	99	100	100	100	100
	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN 2 : Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	84,95	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35

2.3. Perjanjian Kinerja 2025 (Awal)

Perjanjian kinerja merupakan penetapan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025 terdapat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	25,30
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	25,11

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.1	Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	persen	100
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	persen	36,80
1.2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	persen	100
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	-	87

2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan di susun berdasarkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dengan uraian pada table 2.4

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja PerubahanTahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	25,3
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	25,11
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	%	100
1.1	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan	persen	97

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
	Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan daerah		
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	persen	98
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	persen	100
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	persen	100
1.2	Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	persen	100
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	-	85,10

Secara lengkap dokumen perjanjian kinerja awal dan perubahan eselon II (Kepala Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tersebut memberi gambaran tercapai/tidaknya target beserta penjelasan yang cukup memadai, sebagai bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya. Uraian capaian kInerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada masing-masing indikator

A. Pencapaian kinerja Bappelitabangda Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 (awal)

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan, dapat digambarkan melalui Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,3	23,94	94,62
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,11	23,71	94,42
1.1	Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	97,33%	97,33
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100	108,5 (nilai sementara)	

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	36,80	18,8 (nilai sementara)	
1.2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	100	100	100
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	86	85,25	99,12

B. Pencapaian kinerja Bappelitabangda Kabupaten Pasuruan di tahun 2025 (perubahan)

Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan dapat di tampilkan pada table 3.2

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,3	23,94	94,62
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,11	23,71	94,42
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	100 %	100%	100%
1.1	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen	97%	97,33	100,34%

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan daerah			
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	98%	100%	100.20%
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	100%	100%	100%
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	85,10	85,25	100,18

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 Bappelitbangda pada tahun 2025 menjelaskan secara keseluruhan menunjukkan tingkat capaian pada masing-masing IKU baik awal dan perubahan.

A. Indikator Tujuan pada Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran hasil dari LHE SAKIP dari Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat penurunan capaian nilai SAKIP pada Tahun 2025 pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan sebesar 24,04 pada tahun 2025 sebesar 23,94 terdapat penurunan sebesar 0,1. Sedangkan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Tahun 2024 sebesar 23,97, pada Tahun 2025 23,71 terdapat penurunan sebesar 0,26.

Beberapa catatan hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PAN/RB tahun 2025 pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yaitu :

1. Perencanaan Kinerja:
 - a. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD sudah cukup baik, dengan menetapkan kinerja yang berorientasi hasil serta indicator kinerja yang SMART. Namun dalam penetapan target kinerja belum sepenuhnya baik, yaitu peentapan target berupa rentang bahkan rentang yang ditetapkan masih dibawah baseline kinerja tahun 2024. Sebagai contoh, target kinerja pada

indicator “ Indeks Pembangunan Manusia” yang menetapkan target rentang dengan batas bawah lebih rendah dari capaian tahun 2024.

- b. Penetapan tujuan dan sasaran strategis masih belum sepenuhnya berorientasi hasil pada level perangkat daerah (PD). Masih terdapat tujuan dan sasaran yang tidak spesifik, sehingga relevansi hubungan tujuan dan sasaran tidak cukup logis, selain itu masih terdapat indikator kinerja yang tidak SMART dan relevan untuk dikawal di level Renstra PD. Sebagai contoh pada Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
- c. Pohon Kinerja PEMDA belum menggambarkan kontribusi PD lintas sektor dalam menunjang kinerja utama daerah. Pohon Kinerja cenderung masih menjenjangkan kinerja per urusannya saja, sebagai contoh pada penjenjangan kinerja terkait Pendidikan. Selain itu pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan berdasarkan kinerja yang ditetapkan pada RPJMD, sehingga belum sepenuhnya tergambar penguraian kinerja strategis pmda sampai dengan level kinerja di perangkat daerah.
- d. Keterkaitan logis antara tujuan, sasaran program dan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya tergambar. Rantai hasil (result chain) dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang runtut. Tidak ada informasi pohon kinerja PD berdasarkan Renstra 2025-2029. Hal ini menyebabkan akan perencanaan kinerja menjadi kurang jelas dalam menggambarkan untuk intervensi instansi/ unit kerja dapat menghasilkan perubahan yang diharapkan
- e. Berdasarkan potret pohon kinerja periode sebelumnya, pohon kinerja perangkat daerah namun belum ada penjabaran target capaian setiap triwulannya. Penjabaran rencana aksi yang dilakukan hanya sebatas pada jadwal pelaksanaan saja, sehingga belum terukur progress capaiannya setiap triwulan.
- f. Rencana Aksi PD yang disusun sudah menunjukkan aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja, namun belum ada penjabaran target capaian setiap triwulannya. Penjabaran Rencana Aksi yang dilakukan hanya sebatas pada jadwal pelaksanaannya saja, sehingga belum terukur progress capaiannya setiap triwulan.

2. Pengukuran Kinerja:

- a. Belum semua PD menyampaikan dokumen IKU berdasarkan Renstra 2025-2029. Namun berdasarkan potret format dokumen IKU yang disampaikan penjabaran informasi terkait IKU relative lebih baik, sudah menyajikan definisi operasional belum sepenuhnya baik, sehingga belum memberikan ukuran/kinerja yang jelas terhadap indicator kinerja yang digunakan pada dokumen perencanaan.
- b. Sampai dengan bulan Desember 2025 catatan ini dibuat, masih terdapat beberapa PD yang tidak tertib menyampaikan hasil pengukuran kinerjanya, termasuk analisis permasalahan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SIMONEVA. Belum ada isian penjabaran target kinerja triwulanan dan hasil pengukurannya untuk setiap triwulannya. Sebagai contoh pada isian pengukuran kinerja Dinas Pendidikan.
- c. Belum ada mekanisme pemberian reward and punishment bagi setiap PD berdasarkan ketertiban dan capaian kinerja hasil pengukuran berkala, sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses pengukuran kinerja berkala. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan.

B. Indikator Sasaran Tingkat keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat keselarasan antara Renstra dan RPD (Nilai-1) (bobot 0,5) dengan kriteria:
 - Selaras pada Tujuan Renstra dengan Sasaran RPJMD (0,25)
 - Konsistensi Program (0,25)
 - Konsistensi Indikator Kinerja Program (0,25)
 - Konsistensi Indikator Kinerja Program (0,25)
2. Tingkat keselarasan antara Renja dan RKPD (Nilai-2) (bobot 0,5) dengan kriteria:
 - Konsistensi Program/Kegiatan/subKegiatan (0,3)
 - Konsistensi Indikator Program/Kegiatan/subKegiatan (0,4)
 - Konsistensi Target Indikator Program/Kegiatan/subKegiatan (0,3)

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dihitung dengan formulasi :

$$T. Keselarasan = \frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD}}{\text{Jumlah seluruh PD}}$$

Hasil perhitungan realisasi indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Tk. Keselarasan &= \frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100 \\
 &= \frac{5052,78}{52} \times 100 = 97,17\%
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator ini jika dibandingkan target nilainya masih di bawah target dengan capaian 100,17%.

Rincian perhitungan tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan masing-masing perangkat daerah sebagaimana Tabel 3.2. Berdasarkan tabel tersebut nilai tingkat keselarasan dokren PD dengan dokren Pemda berada pada angka 84% sampai dengan 100% dengan rata-rata 97,17%. Kriteria yang belum optimal pada 'konsistensi penetapan target indikator kinerja Program antara Renstra dengan RPJMD' dan 'konsistensi penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan antara Renja dengan RKPD'.

Tabel 3.2
Kertas kerja Keselarasan Antar Dokumen, RPD-Renstra dan RKPD-Renja

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
1	DINAS PENDIDIKAN	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
2	DINAS KESEHATAN DAERAH & DALDUK	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	1	0,5	96,875
3	SATPOL	1	1	1	0,75	0,46875	1	0,75	1	0,45	91,875
4	DINAS SOSIAL DAN PPA	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	0,75	0,4625	93,125
5	DISNAKER	1	0,75	0,75	0,75	0,40625	1	1	1	0,5	90,625
6	DISPENDUKCAPIL	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
7	DPMD	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
8	DISPORA	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	0,75	0,4625	93,125
9	DINAS PERPUSIP	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	1	0,5	96,875
10	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)			(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)
11	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
12	BAPPERIDA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100,00
13	BKPSDM	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
14	INSPEKTORAT	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
15	BAKESBANGPOL	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
16	KEC GEMPOL	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
17	KEC BANGIL	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
18	KEC REMBANG	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
19	KEC PRIGEN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
20	KEC POHJENTREK	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
21	KEC GD.WETAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
22	KEC WINONGAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
23	KEC REJOSO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
24	KECAMATAN GRATI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
25	KECAMATAN LEKOK	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)			(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
26	KEC NGULING	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
27	KEC SUKOREJO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
28	KEC PASREPAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
29	KEC PANDAAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
30	KEC TOSARI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
31	KEC PURWOSARI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
32	KEC PURWODADI	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
33	KEC LUMBANG	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
34	KEC KRATON	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
35	KEC TUTUR	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
36	KEC BEJI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
37	KEC PUSPO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
38	KEC KEJAYAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
39	KEC WONOREJO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
40	DINAS CK TR	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
41	DINAS SDA BMBK	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)			(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)
42	DINAS PERKIM	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
43	BPBD	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
44	DINAS KP DAN PERTANIAN, PETERNAKAN	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
45	DLH	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
46	DISHUB	1	1	1	0,33	0,42	1	1	1	0,5	91,67
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
48	DISKOP-UKM DAN PERINDAG	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
49	DPMPTSP	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
50	DINAS BUD PARIWISATA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
51	BKAD										
52	BAPPENDA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
JUMLAH											5.052,87

C. Indikator Tingkat Capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggunakan IKU sesuai PK Bupati Pasuruan (RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026) dan PK Bupati Pasuruan Perubahan (RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029)

Tingkat capaian IKU dan IKD diukur dengan menghitung rerata capaian semua IKU dan IKD. IKU dan IKD dimaksud sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD. Capaian IKU dan IKD diperoleh dengan membandingkan antara realisasi terhadap target IKU dan IKD berdasarkan perjanjian kinerja Bupati dan RKPD. Perhitungan Tingkat Capaian Realiasi IKU dan IKD sesuai RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan Capaian Realisasi IKU dan IKD Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut.

$$\text{capaian IKU dan IKD} = \frac{\text{Jumlah Capaian masing-masing IKU dan IKD}}{\text{Jumlah capaian seluruh IKU dan IKD}}$$

Penjelasan :

Capaian = perbandingan Realisasi kinerja dengan Target

Target IKU sesuai PK Bupati

Target IKD (IKK) sesuai RKPD

Hasil perhitungan realisasi indikator capaian IKU dan IKD berdasarkan formula tersebut:

- Capaian IKU dan IKD (PK Bupati Awal) 22 indikator

$$\frac{1627,90}{15} = 108,5$$

(ada 7 indikator yang belum rilis dari BPS dan BAPANAS)

- Capaian IKU dan IKD (PK Bupati Perubahan)

$$\frac{4502,85}{41} = 109,23$$

Dari IKU dan IKD yang ada sejumlah 69 indikator, terdapat 28 indikator yang belum tersedia data realisasi tahun 2025. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target menunjukkan nilai di dengan capaian 109,23 %

Secara rinci perhitungan Capaian IKU dan IKD dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan Tabel 3.4

Tabel 3.3
Capaian IKU dan IKD Tahun 2025 Sesuai RPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2025 (PK BUPATI)	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,920	5,87	99,16
2	Indeks Gini		0,301	0,309	102,66

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2025 (PK BUPATI)	Realisasi	Capaian
3	Indeks Wiliamson		0,245	0,245	100,00
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,150	8,21	100,74
5	Indeks Reformasi Birokrasi		69,520	belum rilis	
6	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Milyar	5.984.738	belum rilis	
7	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar	74.940.996	belum rilis	
8	Pendapatan Perkapita	Juta	123,530	belum rilis	
9	Nilai Investasi Daerah	Milyar	9.400.000.000.000	15.923.293.314.605	169,40
10	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	48,15	78,64	163,32
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,68	69,02	96,29
12	Indeks Resiko Bencana	Indeks	106,27	116,75	109,86
13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,70	73,02	100,44
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,33	belum rilis	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,70	4,22	89,79
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,43	belum rilis	
17	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,57	belum rilis	
18	Nilai SAKIP		81,40	76,06	93,44
19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00
20	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,00	80,3	102,95
21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Indeks	3,88	3,88	100,00
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,75	93,62	99,86
JUMLAH					1627,90

Tabel 3.4
Capaian IKU dan IKD Tahun 2025 Sesuai RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,68	69,02	96,289
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,99	0,71	11,853
3	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	15,54	6,39	41,120
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	20	20,30	101,500
5	Jumlah Sampah Terproses di TPA	Ton	50.101,60	60.000	119,757
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	4.143,26	20.453,47	493,656
7	Indeks Risiko Bencana*	Indeks	119	116,75	98,11
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,48		0,000
9	Konsumsi Listrik perKapita	kWh/kapita	7.126,77	2.235,60	31,369
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	18,43	24,67	133,858
11	Rasio Kebutuhan Air baku dan Ketersediaan Air Baku				
	Irigasi	Persen	73,31	73,31	100,000
	Air minum	Persen	15,56	26,45	169,987
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,73	0,73	100,000
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
II.1	Kesejahteraan Ekonomi				
13	Pertumbuhan Ekonomi**	Persen	4,15-540	5,87	102,98
14	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,358	0,309	95,08
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,14-8,39	8,21	96,47
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,38-4,67	4,22	87,01
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,46	73,02	100,77
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,74	74,81	100,094
19	PDRB perkapita*	Juta Rupiah	121,89-128,16		
20	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,40	56,60	73,13
21	Prevalensi Stunting pada Balita*	Persen	20,46	Belum rilis	0,000
22	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	Persen	90	95,19	105,767
23	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)	Persen	90	86,00	95,556
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	99,66	99,660
25	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen literasi (Angka literasi)*				
	SD/MI	Persen	83	78,37	94,42
	SMP/MTs	Persen	83	75,31	90,73

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen numerasi (Angka Numerasi)*				
	SD/MI	Persen	74	79,22	107,05
	SMP/MTs	Persen	74	76,23	103,01
27	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun*	Tahun	8,05	7,47	92,80
28	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun	Tahun	12,79	12,91	100,938
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*	Persen	8,9	Belum rilis	0,000
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	31,97	Belum rilis	0,000
31	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persen	37,59	Belum rilis	0,000
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,82	80,6	98,51
33	Indeks Kebudayaan Daerah*	Indeks	59,61	Belum rilis	0,000
34	Indeks Pembangunan Keluarga*	Indeks	62,75	Belum rilis	0,000
35	Indeks Ketimpangan Gender*	Indeks	0,335	Belum rilis	0,000
36	Indeks Pembangunan Gender*	Indeks	91,34	Belum rilis	0,000
37	Indeks Perlindungan Anak*	Indeks	64,62	Belum rilis	0,000
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
38	Rasio PDRB Industri Pengolahan*	Persen	60,66	8,21	13,54
39	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	Persen	3,38-4,23	Belum rilis	n/a
40	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	32.106	30.586	95,27
41	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Persen	3,51	1,73	49,29
42	Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Besar	Persen	8,79	Belum rilis	0,000
43	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB*	Persen	0,71	Belum rilis	0,000
44	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	7,31	Belum rilis	0,000
45	Rasio Pajak Daerah dalam PDRB*	Persen	0,27	Belum rilis	0,000
46	Realisasi Investasi**	Triliun (Rp)	16,5	11,04	66,90%
47	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*	Persen	0,48-1,54	Belum rilis	
48	Indeks Ekonomi Berkelanjutan*	Indeks	72,6	Belum rilis	0,000
49	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur*	Persen	6,56	Belum rilis	0,000
50	Rasio kewirausahaan	Rasio	1,81	Belum rilis	0,000

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,8	63,05	98,824
51	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	68,32	73,80	108,021
52	Indeks Daya Saing Daerah*	Indeks	3,42	Belum rilis	0,000
53	Indeks TIK*	Indeks	5	Belum rilis	0,000
54	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	44	49,14	111,68
55	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK*	Persen	27,62-30,15	Belum rilis	n/a
56	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	10,79	Belum rilis	0,000
57	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,03	Belum rilis	0,000
58	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,76	78,64	114,32
59	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	78	Belum rilis	000
60	Persentase Desa Mandiri (realisasi 2024 menggunakan IDM, target mulai 2025 menggunakan indeks desa)	Persen	9,97	Belum rilis	000
61	Tingkat Inflasi***	Persen	2,73	2,73	100,000
62	Indeks Akses Keuangan Daerah*	Indeks	3,01	Belum rilis	0,000
63	Indeks Zakat Nasional*	Poin Indeks	0,54	Belum rilis	0,000
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
64	Indeks Reformasi Birokrasi*	Indeks	84,8	Belum rilis	0,000
65	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52	4,27	94,469
66	Indeks Integritas	Indeks	70,6	72,82	103,144
67	Indeks SPBE	Indeks	4,18	3,88	92,82
68	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,68	93,62	99,936
69	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100,00	100,000
JUMLAH					4502,85

D. Indikator Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target.

Perhitungan indikator ‘persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target’ menggunakan formula:

$$\frac{Jumlah\ IKU\ dan\ IKD\ yg\ tidak\ mencapai\ target}{Jumlah\ seluruh\ IKU\ dan\ IKD} \times 100\%$$

Penjelasan :

Target IKU dan IKD (IKK) sesuai RKPD

Pada Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa jumlah IKU dan IKD sebanyak 22 indikator, sebanyak 5 indikator yang tidak tercapai, 7 indikator belum ada data sehingga perhitungannya :

$$Jml\ IKU\ dan\ IKD\ yg\ tdk\ mencapai\ Target = \frac{5}{15} \times 100\% = 33,3\%$$

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui jumlah IKU dan IKD sebanyak 69 indikator, indikator yang targetnya tercapai sebanyak 20 indikator, target tidak tercapai sebanyak 15 indikator, dan belum ada data sebanyak 34 indikator. Sehingga persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target diperoleh nilai :

$$Jml\ IKU\ dan\ IKD\ yg\ tdk\ mencapai\ Target = \frac{22}{41} \times 100\% = 53,65\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka target untuk Indikator 'Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target' mencapai target tahun 2025 pada perhitungan IKU Dan IKD sesuai RPD Kabupaten Pasuruan sebesar 33,3% dengan capaian 191,23% dan IKU dan IKD sesuai RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan 53,65% atau dengan capaian sebesar 153,65%.

E. Indikator Tingkat Keselarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan menilai keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD dan keselarasan antara RKPD dengan RPJMD. Masing-masing keselarasan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD (bobot 0,5)
 - a. Keselarasan Visi/Misi RPJMD dengan Arah Kebijakan RPJPD (bobot 1)
2. Keselarasan RKPD dengan RPJMD (bobot 0,5)
 - a. Tema RKPD dengan Arah Kebijakan RPJMD (bobot 0,25)
 - b. Konsistensi Program (bobot 0,25)
 - c. Konsistensi IK Program (bobot 0,25)
 - d. Konsistensi Target IK Program (bobot 0,25) (catatan: untuk tahun pertama, untuk tahun berikutnya memperhatikan realisasi tahun sebelumnya)

Perhitungan realisasi indikator 'Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah' menggunakan formula:

Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah = (Nilai keselarasan RPJMD-RPJPD + Nilai keselarasan RKPD-RPJMD) x 100%

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun/tersedia di tahun 2025 yaitu: RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029, RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025. Berdasarkan kondisi tersebut dan penjelasan pengukuran keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. RPJMD 2025-2029 memuat kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, Visi Misi serta tujuan dan Sasaran yang menjadi Prioritas Kepala Daerah terpilih.
2. Penilaian keselarasan PRKPD tahun 2025 dilakukan terhadap dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Perhitungan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel 3.4. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

Tabel 3.4
Kertas Kerja Perhitungan Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Keselarasan RPJPD- RPJMD	Nilai Var1	Keselarasan RPJMD-RKPD				Nilai Var2	(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
0,5		0,5					
Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD- Visi/Misi RPJMD		Arah Kebijakan RPJMD- Tema RKPD	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya		
0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	
(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
1	0,5	1	1	1	1	0,5	100

F. Indikator Tingkat Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD

Tingkat keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Tingkat keselarasan INODA dan IKU/IKD} = \frac{\text{Jumlah INODA yg mendukung IKU IKD}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat keselarasan INODA dan IKU/IKD} &= \frac{217}{217} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Inoda = Inovasi daerah, berdasarkan SK Bupati tentang inovasi daerah

IKU / IKD berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Kertas kerja perhitungan keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5
Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU IKD Kabupaten Pasuruan

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
1	SI MANTAB	(System Informasi Manajemen Tangguh Bencana)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Risiko Bencana*
2	SIAP SATYA	(Sistem Informasi Administrasi Pembangunan Sejahtera, Maslahat Daerah Berdaya Saing)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Indeks SPBE
3	SIKEMAS	(Sistem Informasi Kematangan Organisasi Daerah)	BAGIAN ORGANISASI	Indeks SPBE
4	CUKUR KAPAS	(Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Pasuruan)	BAGIAN PEREKONOMIAN	Pertumbuhan Ekonomi
5	SUKET TEKI	(Suratku Terpantau Kini Daerah Kabupaten Pasuruan)	BAGIAN UMUM SEKDA	Indeks SPBE
6	KAMPUNG SANTRI	(Kami Punya Layanan Gratis Selesai Tanpa Antri)	BAKESBANGPOL	Indeks SPBE
7	Sinaran	(Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)	BAKESBANGPOL	Indeks SPBE
8	GERAKAN KASIH BERSANDING MESRA	(Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera)	BAPPELITBANGDA	Prevalensi Stunting pada Balita
9	APLIKASI KEMISAN MESRA	(Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera)	BAPPELITBANGDA	Tingkat Kemiskinan

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
10	SIAP GRAK	(Sistem Aplikasi Pelayanan Gratis, Ramah, Akurat, Kredibel)	BKPSDM	Indeks SPBE
11	SIP TRANSPARAN	(Sistem Informasi Badan Pengelolaan Perekaman Transaksi Keuangan Dan Pendapatan Pajak Daerah Kab. Pasuruan)	BPKPD	Indeks SPBE
12	JAJALEN PAS	(Jaringan Jalan Kabupaten Pasuruan)	DINAS BINA MARGA & BINA KONTRUKSI	Indeks Infrastruktur Wilayah
13	POSTING	(Posyandu Tematik Stunting)	DINAS KESEHATAN	Prevalensi Stunting pada Balita
14	WAOSS TBC	(WhatsApp Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis)	DINAS KESEHATAN	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
15	SI SULTAN	(Sistem Informasi Konsultasi Layanan Antar Kerja)	DINAS KETENAGAKERJAAN	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
16	SAKTI PLUS	(Sistem Aplikasi Komunikasi dan Teknologi Informatika Pelayanan Langsung Untuk Semua)	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
17	BUKU TAMU ELEKTRONIK EXTENDED	Sistem pencatatan tamu digital yang dilengkapi evaluasi pelayanan publik	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
18	SATU DATA	(Portal Satu Data Sektoral Terpusat)	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
19	DOKUMEN	(Dokumentasi Digital Kolaborasi Bersama Teman)	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
20	SPLP	(Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
21	SPBE	(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	DINAS KOMINFO	Indeks SPBE
22	BAJUMAS		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
23	PROKASI		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
24	SIMASE	(SISTEM INFORMASI MASYARAKAT AKSES SEWA)	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Indeks SPBE
25	GERBANG PENDEKAR SANTRI	(Gerakan Pengembangan Pendidikan Etika, Karakter, Santun, Terpuji, dan Religius)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
26	OMAHKU PASURUAN		DINAS PERKIM	Indeks Infrastruktur Wilayah

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
27	MANGKAS KOPI	(Manfaatkan Galon Bekas Dalam Fermentasi Kopi)	DINAS PERTANIAN	Indeks Inovasi Daerah
28	TEH SEMALAM	(The Bunga Sedap Malam)	DINAS PERTANIAN	Indeks Inovasi Daerah
29	MAREM SUKO SAKANCANE	Mangga Rembang Sukorejo Satu Kawasan sebagai cara Peningkatan ekonomi petani	DINAS PERTANIAN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
30	NGUSAP ARIT	(Ngerumat Sapi Tanpo Ngarit)	DINAS PETERNAKAN	Indeks Inovasi Daerah
31	STMJ SAKERA & BAKSO SAKERA	(Sehat, Kuat, Dan Perkasa) & (Sehat Nikmat Menggugah Selera)	DINAS PETERNAKAN	Indeks Pelayanan Publik
32	LASKAR EMAS	(Layanan Kesejahteraan Rakyat Menuju Era Maju Adil Sejahtera)	DINAS SOSIAL	Indeks Pelayanan Publik
33	SAKTI	(Sistem Aplikasi Konsultasi Teknologi Informatika)	DISKOMINFO	Indeks Pelayanan Publik
34	APLIKASI BUKU TAMU ELEKTRONIK	(E Buku Elektronik)	DISKOMINFO	Indeks Pelayanan Publik
35	SIMAMAH	(Siap Melayani Di Rumah)	DISPENDUKCAPIL	Indeks Pelayanan Publik
36	SIMANIS DUDUK MANJA	(Sistem Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Usia Senja)	DISPENDUKCAPIL	Indeks Pelayanan Publik
37	HELLO KID	Suatu Sistem Atau Platform Digital Yang Dirancang Untuk Memberikan Kemudahan Dalam Mengakses Layanan Publik Serta Pengelolaan Data Yang Lebih Efisien Dan Transparan.	DISPERINDAG	Indeks Pelayanan Publik
38	PELASAN	(Pelatihan Santri)	DISPERINDAG	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
39	PERWIRA KELUARGA	(Perempuan Wirausaha Berbasis Keluarga)	DISPERINDAG	Indeks Pembangunan Keluarga
40	SOBO PASAR	(Gerakan Mewujudkan Pasar Maslahat Yang Nyaman Dan Aman Dengan Penataan Fisik Yang Bersih, Indah, Rapi Dan Peningkatan Layanan Yang Ramah.)	DISPERINDAG	Indeks Pelayanan Publik
41	SEPAKAT Integritas	(Sistem Pengaduan dan Konsultasi Inspektorat)	INSPEKTORAT	Indeks Pelayanan Publik
42	TARI BEPENG	Satuan Tugas Menjaga Kondusifitas Dan Keamanan Wilayah, Serta Menangani Permasalahan Terkait Bencana Alam, Gelandangan, Pengamen, Pengemis, Dan Orang	Kecamatan Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
		Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		
43	PRISTALTIK	(Pelayanan Administrasi dengan Menukar Botol Plastik)	KECAMATAN BEJI	Indeks Inovasi Daerah
44	SEKAMPADU	(Sedekah Kamis Untuk Panti Asuhan Dan Dhuafa)	Kecamatan Kraton	Indeks Inovasi Daerah
45	PAKDE LEKOK	(Pembinaan Administrasi Dan Tupoksi Perangkat)	Kecamatan Lekok	Indeks Pelayanan Publik
46	SMD	(Surat Mlaku Dewe)	Kecamatan Pandaan	Indeks Pelayanan Publik
47	TAMASYA KE PRIGEN	(Data Bersama Masyarakat)	Kecamatan Prigen	Indeks Pelayanan Publik
48	SIPADU	(Sistem Informasi Pariwisata Terpadu)	Kecamatan Purwodadi	Indeks Pelayanan Publik
49	TUYONE BUMDES GERBO	(Digitalisasi Administrasi Hippam Tuyone Bumdes)	Kecamatan Purwodadi	Indeks Pelayanan Publik
50	KUMAT BERSERI	(Kumpul Jumat Bersih Sehat Dan Asri)	Kecamatan Puspo	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
51	HADAP MANTAN	(Hadiah Pelayanan Mantapnya Kejutan)	Kecamatan Sukorejo	Indeks Pelayanan Publik
52	BAKMI BANG CATUR	(Bayar Pajak Bumi Bangunan Kecamatan Tukur)	Kecamatan Tukur	Indeks Pelayanan Publik
53	AKU BEDA APBDES SMART	Akuntabilitas Bendahara SEMAR Dan Operator Dalam Meningkatkan Kecepatan Dan Ketepatan Penggunaan APB Desa Karangasem Dan Karangjati Anyar Kecamatan Wonorejo	Kecamatan Wonorejo	Indeks Pelayanan Publik
54	RUSA MAS	(Merubah Sampah Menjadi Emas (E-Bank Sampah))	Paud Darul Mukmin	Indeks Inovasi Daerah
55	E-SIKEP	(Elektronik Sistem Kinerja Pegawai)	RSUD Bangil	Indeks SPBE
56	TILIK LAYANAN	(Temu Pasien, Telusur, Inspeksi Dan Eksekusi Langsung Di Layanan)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
57	GRUNENG REK	(Google Review Dan Medsos Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di RSUD Bangil)	RSUD BANGIL	Indeks SPBE
58	GOOD BETTER BEST	(Gadar On The Road Bangil Emergensi Terintegrasi Dan Trauma Center Bangil Emergency Service Team)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
59	BY PREM	(Pendampingan Bayi Prematur)	RSUD BANGIL	Usia Harapan Hidup
60	ASTRONOT PARKIT	(Aplikasi Stroke Notifikasi Pra Rumah Sakit)	RSUD BANGIL	Usia Harapan Hidup
61	SI RADIT	(Sitem Informasi Radiologi Digital Cepat)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
62	SATRIA BISNIS	(Strategi Terpadu Rumah Sakit Inovasi Bisnis)	RSUD BANGIL	Indeks Inovasi Daerah

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
63	DELIMA KRISTA	(Dengan Air Limbah Kebun Rimbun Seger Taman Asri)	RSUD BANGIL	Indeks Inovasi Daerah
64	SIDIK RSB	(Sistem Informasi Peserta Didik)	RSUD BANGIL	Indeks SPBE
65	SI MANIS RSB	(Sistem Manajemen Inventaris)	RSUD BANGIL	Indeks SPBE
66	KEPINGIN PATAS	(Kerjasama Dampingi Layani Pasien Sampai Tuntas)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
67	JAGAIN PASIEN	(Jadwal Ganti Infus Pasien Dengan Observasi Dan Tulis)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
68	VIBES SULTAN	(Visite Besar Untuk Menyelesaikan Kasus Penyakit Yang Sulit Secara Simultan)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
69	GETUK SAPI	(Pengendalian Kepatuhan Dan Risiko Bersama Spi)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
70	SI PENA SIBER	(Pelaksanaan Supervisi Berjenjang)	RSUD BANGIL	Indeks Pelayanan Publik
71	SENDAKKEP	(SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK DATA KINERJA DAN KEPEGAWAIAN)	RSUD GRATI	Indeks SPBE
72	SI AHLI	(SISTEM INFORMASI KEHADIRAN ELEKTRONIK)	RSUD GRATI	Indeks SPBE
73	EMME Care	(ELECTRO MEDICAL EQUIPMENT CARE)	RSUD GRATI	Indeks Pelayanan Publik
74	KSatria Biru	(kecepatan satuan respon informasi darurat kebakaran di Pasuruan)	Satpol PP	Indeks Pelayanan Publik
75	JASITER	(Jadilah Siswa Berkarakter)	Sd Islam Siti Khadijah Wonorejo	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
76	GAPERSIONAL	(Gerakan Permainan Tradisional Wonorejo)	Sd Islam Siti Khadijah Wonorejo	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
77	MANZILIYAH ASAH KARAKTER		Sd Maarif Jogosari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
78	NUANSA CONTENT & PODCAST	(SDNU Bangil Unjuk Kebolehan Siswa)	SD Nahdlatul Ulama Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
79	TEKNIK DEBUG	(deteksi masalah, evaluasi, benahi, ulangi proses, dan rgapai solusi)	SDN Gambirkuning	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
80	COIN	(Class of Innovation)	SDN Tamansari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
81	KLU - JARAN MENDAL	(inKLUsifita dalam pembelaJARAN MENDALam)	SDN Tampung 2 Lekok	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
82	Berlian	(Berdiferensiasi with Literasi & Numerasi)	SDN Wonokerto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
83	EDUTAINMENT	(Edukasi dan Entertainment)	Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
84	Cerdas Inklusi	(Cara Cepat Belajar Tajdied Siswa Inklusi)	Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
85	DPRD KABUPATEN PASURUAN DI UJUNG JARI DENGAN SMART NOTULEN	Digitalisasi Pengelolaan Dokumen Notulen Rapat Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, Dan Aksesibilitas Informasi Publik.	SEKRETARIAT DPRD	Indeks SPBE
86	Cermat Uswah	(Cerdas Menulis Tugas Akhir)	SMPIT Al Uswah Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
87	SETIA ALAMI	(sabun ecoenzyme telang untuk kulit alami)	SMPN 1 pandaan	Indeks Inovasi Daerah
88	Lili JelinTeng	(lilin limbah jelantah dan Bunga Telang)	SMPN 1 pandaan	Indeks Inovasi Daerah
89	DILAN BK	(Digitalisasi Layanan BK)	SMPN 4 Puspo Satu Atap	Indeks Inovasi Daerah
90	Propaganda	(Program peningkatan literasi melalui Gambar bercerita)	SMPN 4 TOSARI SATU ATAP	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
91	Radar GPS	(Gerakan Sadar Pungut Sampah Sekitar)	SMPN 4 TOSARI SATU ATAP	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
92	TRAJADURA	(TRAdisional JAwa maDURA)	TK PGRI 2 NGULING	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
93	Anting Naga	(penurunan stunting melalui tanaman obat keluarga)	UOBF Puskesmas Ambal Ambil	Prevalensi Stunting pada Balita
94	Berlian Hitam	(bersama temukan, bimbing ODHA untuk kesehatan dan hilangkan stigma masyarakat)	UOBF Puskesmas Ambal Ambil	Usia Harapan Hidup
95	GEMAS NYEDAK TB	(Gerakan Masyarakat Nyetor Dahak Tb)	UOBF Puskesmas Bangil	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
96	SEINDAH DEKAPAN IBU	Semangat Cintai ODHA Dengan Kunjungan Periksa Lanjut Ingat Obati Untuk Tetap Sehat	UOBF Puskesmas Gempol	Usia Harapan Hidup
97	PENAK MAKAN JENGKOL	(Penurunan AKI AKB Maksimalkan Jejaring Kolaborasi)	UOBF Puskesmas Gempol	Usia Harapan Hidup
98	BERTASBIH	Banner Dan Duta Pemantauan Kesehatan PHBS Santri	UOBF Puskesmas Gondangwetan	Indeks Pelayanan Publik
99	PAK DE KETAWA	(Penanganan Kasus Dan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa)	UOBF Puskesmas Gondangwetan	Usia Harapan Hidup
100	GESANG LANSIA	(Gerakan Sayang Lansia)	UOBF Puskesmas Gondangwetan	Usia Harapan Hidup
101	SELENDANG BARU	setor sampah lebaran dapat uang baru	Uobf Puskesmas Gondangwetan	Indeks Inovasi Daerah
102	SMART GONTA	(Sistem Pembinaan Kader Kolaboratif Dan Terintegrasi Puskesmas Gondangwetan)	Uobf Puskesmas Gondangwetan	Indeks Pelayanan Publik

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
103	SIDAHSYAT	(Sinergi Pendampingan Holistik Layani Pasien Tuberkulosa)	UOBF Puskesmas Grati	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
104	Gemar Ceting	Gerakan Masyarakat Cegah Stunting	UOBF Puskesmas Grati	Prevalensi Stunting pada Balita
105	Gebrak Pendekar Pantura	Gerakan Bersama Aksi Pendekatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pemantauan dan Upaya Perbaikan Sanitasi	UOBF Puskesmas Grati	Indeks Pelayanan Publik
106	Aspilet	Asuhan Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	UOBF Puskesmas Grati	Angka Kematian Ibu
107	Kurma Manis	Kunjungan Rumah Bersama Meningkatkan Cakupan Imunisasi	UOBF Puskesmas Grati	Usia Harapan Hidup
108	Kaca Pintar Dedi Torik	Kenali dan Cegah Penyakit Tidak Menular dengan Deteksi Dini Faktor Resiko	UOBF Puskesmas Grati	Usia Harapan Hidup
109	Air Mata Mantan	Air Minum Rumah Tangga Aman dan Berkelanjutan	UOBF Puskesmas Grati	Indeks Pembangunan Keluarga
110	LASEGAR TOK	(Lansia Sehat dan Bugar dengan Tanaman Obat Keluarga)	UOBF Puskesmas Karangrejo	Usia Harapan Hidup
111	GETAR HATI	(Gerakan Alternatif Mengatasi Penyakit Tidak Menular Dengan Kesehatan Tradisional)	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan	Usia Harapan Hidup
112	POSYANDU REGASA	(Posyandu Remaja Gaul Sehat Dan Bahagia)	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan	Indeks Pelayanan Publik
113	Pencit Mantoss	(Penjaringan Capaian TBC dan Pemantauan Obat sampai Sembuh)	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
114	Alpoket Ceting	(Analogi Kelompok Hebat Cegah Stunting)	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan	Prevalensi Stunting pada Balita
115	BS TWO	(Bumil Smart Balita Sehat)	UOBF Puskesmas Kepulungan	Angka Kematian Ibu
116	PAK RT	Pendampingan Aktif Keluarga Rawan TBC	UOBF Puskesmas Kraton	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
117	LOKAFOGO	(Lahir Oleh Kartu Keluarga, Foto New Born, Dan Goody Bag)	UOBF Puskesmas Lekok	Indeks Pelayanan Publik
118	Kebas ting-ting	(kedai balita sehat tinggalkan stunting)	UOBF Puskesmas Lumbang	Prevalensi Stunting pada Balita
119	Moncer	(Mobile ANC Terpadu?)	UOBF Puskesmas Lumbang	Indeks Pelayanan Publik
120	SIDADU	(kreasi kudapan di posyandu)	UOBF Puskesmas Ngempit	Indeks Pelayanan Publik

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
121	Besan bertasbih	(bersama santri berantas TB)	UOBF Puskesmas Ngempit	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
122	Rima Bergas tebas linu	(Rawat inap menyenangkan bersama petugas cekatan dan bebas memilih menu makanan)	UOBF Puskesmas Ngempit	Indeks Pelayanan Publik
123	Menebar kharisma	(melayani foto ekspresif bayi Baru lahir dan akta kelahiran gratis, Ma....)	UOBF Puskesmas Ngempit	Indeks Pelayanan Publik
124	Peniti Bumil bersandi	(penanganan dini resiko tinggi pada bumil bersama dokter internship)	UOBF Puskesmas Ngempit	Angka Kematian Ibu
125	Hati gulita	(Sehat dengan hipertensi dan gula darah terpantau)	UOBF Puskesmas Ngempit	Usia Harapan Hidup
126	GHOST BUSTER	(Gerakan Holistik Budayakan Sehat Dari Penyakit Tidak Menular)	UOBF Puskesmas Nguling	Usia Harapan Hidup
127	YANC TERKASIH	(Pelayanan Ante Natal Care Terpadu Kawal Kesehatan Ibu Hamil Secara Holistik)	UOBF Puskesmas Nguling	Angka Kematian Ibu
128	PAK JUMAIN	(Pantau Kesehatan Jiwa Unsur Masyarakat Dan Instansi)	UOBF Puskesmas Nguling	Usia Harapan Hidup
129	INSTAGRAM.COM	(Instalasi Gawat Rawat Mobile Dan Comprehensif)	UOBF Puskesmas Nguling	Indeks Pelayanan Publik
130	CEK KOMPRESOR	(Cangkruk'an Edukasi & Konsultasi Komunitas Pelaku Beresiko Sehat Bersama Orang Sekitar)	UOBF Puskesmas Nguling	Usia Harapan Hidup
131	RANGER X-TB	(oRang berGerak X(Stop) penyebaran TB)	UOBF Puskesmas Nongkojajar	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
132	Paras Terdiam	(Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi dengan Hipertensi dan Diabetes Mellitus)	UOBF Puskesmas Pohjentrek	Usia Harapan Hidup
133	Gertak Mama bersama Dek Iva	(Gerakan Serentak Pemeriksaan Mobile PTM bersama Deteksi Dini IVA)	UOBF Puskesmas Pohjentrek	Usia Harapan Hidup
134	ceting kekasihku	(cegah stunting dengan gerakan asi eksklusif)	UOBF Puskesmas Prigen	Prevalensi Stunting pada Balita
135	GAMBANG SULING SUTEJO	(Gerakan Bersama Membangun Bangsa Menuju Zero Stunting Dengan Satu Hari Satu Telur Dan Kacang Ijo)	UOBF Puskesmas Purwodadi	Usia Harapan Hidup
136	LAYAR TAWA PUDI	(Pelayanan Penderita Gangguan Jiwa Puskesmas Purwodadi)	UOBF Puskesmas Purwodadi	Usia Harapan Hidup
137	Ceria dan Mempesona	(Cegah Perdarahan Pasca Persalinan Karena Anemia	UOBF Puskesmas Purwodadi	Angka Kematian Ibu

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
		Pada Ibu Hamil Dengan Penggunaan Sticker Warna)		
138	Bu Rani Ke Pasar Masdi	(Buku Raport Penilaian Keterampilan Dasar Kader Puskesmas Purwodadi)	UOBF Puskesmas Purwodadi	Indeks Pelayanan Publik
139	Deni Rawan Antri	(Deteksi Dini / Skrining Poli Rawat Jalan dan Pemeriksaan Antropometri)	UOBF Puskesmas Purwodadi	Angka Kematian Ibu
140	PANSUS	Pantau Sehat Bumil dengan USG di Puskesmas Raci	UOBF Puskesmas Raci	Angka Kematian Ibu
141	Geli ASI Mas	Gerakan Peduli Air Susu Ibu (ASI), Mencegah Anak Stunting	UOBF Puskesmas Raci	Prevalensi Stunting pada Balita
142	PODKES CILU'BA	(Pojok kOnseling Dan Kelas Edukasi Sehat Calon pengantin Ibu hamil ibu bersaLin dan ibu BArita)	UOBF Puskesmas Rejoso	Angka Kematian Ibu
143	GINCU BUNDA	(Gerakan Inovatif Cegah Dengue Untuk Kita Dan Keluarga)	UOBF Puskesmas Seban	Indeks Pembangunan Keluarga
144	POSREM BAPER	(Posyandu Remaja Bawa Perubahan)	UOBF Puskesmas Seban	Indeks Pelayanan Publik
145	SIAP NAKES	(Aplikasi Penjadwalan Tenaga Kesehatan Berbasis Internet Of Thing)	UOBF Puskesmas Sukorejo	Indeks SPBE
146	KAMI ATUR DEMI JIWA	(Kunjungan Agar Minum Obat Demi Jiwa Sehat)	UOBF Puskesmas Sukorejo	Usia Harapan Hidup
147	GERAK CERDIK	(Game Edukasi Kesehatan , Cerdas, Interaktif)	UOBF Puskesmas Sukorejo	Indeks Pelayanan Publik
148	YUK LINMAS E PAKLADI		UOBF Puskesmas Sukorejo	Indeks Pelayanan Publik
149	DEDIKASI BENTOR	(DEteksi DIni KAnker ServIks BErsama liNtas sekTOR)	UOBF Puskesmas Sukorejo	Usia Harapan Hidup
150	MAMA SERBA BISA	(Aman Melahirkan bonus Sertifikat, Goody Bag dan Baby Spa)	UOBF Puskesmas Sumberpitu	Indeks Pelayanan Publik
151	DERASBAT	(Kader Kesehatan Sadar Penggunaan Obat)	UOBF Puskesmas Sumberpitu	Indeks Pelayanan Publik
152	JEBOL TB	(Jemput Bola Dahak Tbc)	UOBF Puskesmas Winongan	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)
153	EDISI SEBANGKU CETING	(Edukasi Gizi Seimbang Untuk Cegah Stunting)	UOBF Puskesmas Winongan	Prevalensi Stunting pada Balita
154	GAPERSONA	(Gerakan permainan tradisional.)	UPT Satuan Pendidikan Islam Siti Khadijah Wonorejo	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
155	ANTARTIKA	Ruang Navigasi Teknologi yang Adaptif, Kolaboratif, Kontekstual, dan Relevan untuk Transformasi Pembelajaran Informatika Anak-Anak Suku Tengger	UPT Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 TOSARI SATU ATAP	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
156	SMART	(Sabtu Mengasah Kreatifitas dan Talenta)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangjatianyar II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
157	IQRO	(Interaktif Qurani Reading Online)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangjatianyar II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
158	MELODIA	(Melodi untuk Edukasi Anak)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tamansari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
159	PAHALA	(Program Anak Hafal Qur'an Juz 30, Asmaul Husna, Lafal Sholat, dan Amal Istighosah)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tamansari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
160	SAWIR	(saluran kewirausahaan)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri TAMPUNG II LEKOK	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
161	STUDA MAGAZINE	(Pengembangan Literasi melalui Majalah Sekolah)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri TUTUR II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
162	SUMIARTI	(Suka Minum Air Putih)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri MINGGIR	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
163	TAMANSARI GOT TALENT		UPT Satuan Pendidikan SDN Tamansari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
164	NEEBS	(Natural Eco Enzyme Body Shower)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rejoso	Indeks Inovasi Daerah
165	BANGKIT	(Bangil Konseling Interaktif Terpadu)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
166	JIPANG KAPAS	(aplikasi Belajar IPA sambil bertualang di Kab. Pasuruan)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Gempol	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
167	KOMIK BELATI SS165	(Komunitas Inovasi Kreasi Pembelajaran Berbasis IT)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Pandaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
168	PC"X" 150CC SS165	(Passion Class "X")	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Pandaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
169	SAJAM GISI SS165	(Satu Jam Giat Literasi)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Pandaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
170	SMART-SIPINTAR	(Sistem Manajemen Administrasi Terpadu- Sistem Informasi Pintu Belajar)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tutur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
171	SEHATI	(Sistem Evaluasi Harian Terintegrasi)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
172	LIVAR NUSANTARA PASURUAN	(Literasi Visual dengan Augmented Reality Berbasis Kearifan Lokal dan IPA)	UPT Satuan Pendidikan SMP	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
			Negeri 3 Purwosari Satu Atap	
173	SAKTI	(Sahabat Andalan Kuasai Materi)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Purwosari Satu Atap	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
174	OPS- TRAP	(Optimalisasi Kemitraan Pembelajaran)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
175	VISI	(Kreativitas dlm Ber 'Komunikasi')	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
176	JARKON MAPEL	(Pembelajaran Kolaborasi antar Mapel)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
177	BELAJAR ALA GANK REMAJA	(BELAJAR ala Group ANaK REndah MotivAsi BelaJAR)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
178	PENSIL DILAN	(Kepemimpinan Siswa dalam Digitalisasi Pembelajaran)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
179	TALI BTARI	(Peningkatan literasi melalui budaya Tosari)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tosari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
180	SI PINTAR HADIR	(Sistem Pencatatan Informasi Nilai Tingkat Absensi Rutin)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gambirkuning	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
181	JELAJAH JAWI CILIK SBG SISTEM PEMBELAJARAN BAHASA JAWI		UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gambirkuning	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
182	KURCACI	(Kursi Cantik Dari Ecobrick)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Jarangan 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
183	E-LIBIC	(Elektronik Library and Creativity)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kedawungkulon II	Indeks SPBE
184	MEMBUAT API PANCA	(Membuat Anyaman Topi Pantai Kain Perca)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kejayan 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
185	SANTERA	(Sabtu Numerasi Literasi Bersama)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kersikan 1 Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
186	GAVE TEVI-M	(Game Web Materi Dan Video-Matematika) Berbasis ICT)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Krengih Rembang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
187	MHVER	(Mengenal Hewan Vertebrata)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Krengih Rembang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
188	SIPONI	(Sistem Pembelajaran Online Terintegrasi)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kurung II Kejayan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
189	GERAK CERIA	(Gerak Aktif Dan Ceria Untuk Guru Dan Siswa)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngabar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
190	BELA SIAGA	(Pembelajaran Alternatif Berbasis Game)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Parerejo 2 Purwodadi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
191	PENERAPAN BETAHFIDZ	Program Pengembangan Peningkatan Kemampuan Menghafal Surah-Surah Pendek Oleh Peserta Didik.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pejangkungan 1 Rembang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
192	PODCAST PENDIDIKAN / MENGGALI JEJAK PRESTASI	Podcast Pendidikan Berbagi Kisah Inspiratif Dari Narasumber Berprestasi Di Berbagai Bidang Untuk Memberikan Motivasi Dan Strategi Meraih Kesuksesan.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pogar 2 Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
193	KEMINTER	(Kebun Mini Berkarakter)	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Susukanrejo 1 Pohjentrek	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
194	SI ADIK	Sistem Berbasis Web Yang Memungkinkan Sekolah Untuk Menyimpan, Mengelola, Dan Mengakses Data Dapodik Secara Lokal Dan Terus-Menerus.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tambakrejo Pasrepan	Indeks SPBE
195	TUTUR SMART LINK	Aplikasi Pembelajaran Digital Yang Dirancang Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Kecamatan Tuter, Khususnya Dalam Menghadapi Tantangan Transformasi Digital.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tuter II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
196	BISMA APP	(Baujeng 1 Sistem Manajemen Kinerja dan Pembelajaran)	UPT Satuan Pendidikan SDN Baujeng 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
197	KASIH IBU APP	(Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Inklusi Baujeng 1)	UPT Satuan Pendidikan SDN Baujeng 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
198	GALAKSI SMS APP	(Gerakan Lingkungan Sekolah Bersih, Sekolah Bayar Sampah)	UPT Satuan Pendidikan SDN Baujeng 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
199	PMK Digital Versi 3	(Perangkat Mengajar Kelas)	UPT Satuan Pendidikan SDN Tamansari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
200	CHRYSLATTE	Inovasi Sabun Herbal Berbahan Susu, Krisan, Dan Kopi Untuk Kelembaban Kulit"	UPT Satuan Pendidikan SMP 1 Tuter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
201	LENERA	(Literasi Numerasi Terpadu Anak)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kejayan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
202	IMPLEMENTASI SUBASA	(Sinau Unggah – Ungguh Basa)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pasrepan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
203	PLATFORM MEDIA PEMBELAJARAN LOKA PYTHAGOREAN	Platform Media Pembelajaran Matematika Berbasis Web Yang Membantu Peserta Didik Memahami Materi Teorema Pythagoras Secara Interaktif.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
204	SI BUCIN	(Sistem Lapor Bullying Dan Curhat Interpersonal)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
205	TONGSIS	(Monitoring Siswa)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
206	E-LEARNING ESPEROGEN HEBAT	Aplikasi E-Learning SMPN 2 Prigen	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Prigen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
207	LAVA MANIS BROMO	Pembelajaran Konservasi Edelweiss yang Ber kesadaran, bermakna, dan sangat Menyenangkan bagi Murid wilayah Tengger	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tosari Satu Atap	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
208	SMART SI PINTAR	Ekosistem Digital Yang Mengintegrasikan Aplikasi SMART (Manajemen Administrasi Berbasis Web) Dan Aplikasi Si-PINTAR (Pembelajaran Interaktif Berbasis Android).	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tutur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
209	PEMBRITOJA	Pembuatan Briket Tongkol Jagung	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 PURWOSARI	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
210	APLIKASI CIKGU	(Catatan Informasi Kurikulum Untuk Guru Dan TU)	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
211	MEDIA PEMBELAJARAN POP UP BOOK	Media Pembelajaran Sederhana Yang Menggunakan Kertas Dan Kreativitas Guru Untuk Mendukung Pembelajaran Interaktif.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Bangil Satu Atap	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
212	SINARA	(Simulasi dan Ilustrasi untuk Ragam Aksi)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 PUSPO	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
213	RUBIKON MOBILE	(Ruang Bimbingan Konseling)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Gempol	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
214	DISMA	Digital Sistem Manajemen Kedisiplinan & Akhlak	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Purwosari	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
215	C.A.R.E	(Coding and Artificial Intelligence Resource for Education)	UPT Satuan Pendidikan SDN Bauj eng 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
216	SEMBARA	(Sumber Belajar dan Berkarya)	UPT Satuan Pendidikan SDN Kuru ng II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	INOVASI	Penjelasan INOVASI	OPD	IKU/ IKD PEMDA
217	Aplikasi BALIDERAN	(Baca Tulis Dengar Bicara dan Koran)	UPT Satuan Pendidikan SDN TUTUR II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

G. Indikator Tingkat Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU Perangkat Daerah

Tingkat keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU Peraangkat Daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$Tingkat\ keselarasan\ INODA\ dan\ IKU/IKD = \frac{Jumlah\ INODA\ yg\ mendukung\ IKU\ PD}{Jumlah\ Inovasi\ Daerah\ Tahun\ 2025} \times 100\%$$

Keterangan:

Inoda = Inovasi daerah, berdasarkan IGA 2025

IKU = Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen PK Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kertas kerja perhitungan keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3.6
Kertas Kerja Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
1	SISTER PERI SI-PLUS	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
2	SENDAKEP	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD GRATI
3	SI PENA PASTI	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
4	SI PINTER SAKTI	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
5	Si Ahli	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
6	DMED	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
7	AVENGERS	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
8	SEGORO	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
9	SMART GAIS	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
10	GERNAP TERI	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
11	MUFAWAN	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
12	BESTI	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
13	SABAKERIS	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
14	LAKON BU ANA	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
15	MEMO	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
16	TUAN JOSAM	Angka Harapan Hidup	RSUD GRATI
17	STROKE HOLISTIK	Angka Harapan Hidup	RSUD BANGIL
18	TRANSJIMAT	Angka Harapan Hidup	RSUD BANGIL
19	DUTA PROLIMAS	Angka Harapan Hidup	RSUD BANGIL
20	JELITA SIAGA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
21	ELADALAH	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
22	ODHALINK SIAP	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
23	BABY SERTIF	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
24	INSENTIFKU	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
25	BANDROL	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
26	FAST DRUG POS	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
27	KORAN HD	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
28	E-SIKEP	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	RSUD BANGIL
29	BENDKURA MAS	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
30	MANTAN TERINDAH	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
31	SI PITUNG	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
32	AWAS GESADUK	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
33	TING TING JAHE	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
34	SEDUHIN AKAS	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
35	SIIM - SALABIM	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
36	PRIVATE DINNER	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
37	WARKOP KEMANGI	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
38	LA SAMBA PRIMADONA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
39	CEK KOMPRESOR	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
40	DAMBAAN SATRIA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS NGULING
41	E-MONBELAR	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
42	KOG MANGGA MENTAH	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
43	KANURA	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
44	MANTRA DOBEL BARIS	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
45	PENSIL DILAN	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
46	ONE DAY OK	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
47	e-PRESIBA	INDEKS PENDIDIKAN	SMPN 4 NGULING
48	JALAN PINTAS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPENDUK CAPIL
49	MY DARLING	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPENDUK CAPIL

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
50	KIOS e-PAKLADI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPENDUK CAPIL
51	SI MAMAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPENDUK CAPIL
52	SIAPADAKU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPENDUK CAPIL
53	KELAS SAGITA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS BANGIL
54	SERAMBI ODHA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS BANGIL
55	BATIK WANGI SEKAR SARI	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS BANGIL
56	SURYAMAS JELITA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS GRATI
57	TERMOMPAH KODHA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS GRATI
58	SI DAHSYAT	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS GRATI
59	PROKASIH	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	DLH
60	BAJUMAS	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	DLH
61	GERHANA MATAHARI	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	DLH
62	SI BUCIN (Sistem Lapor Bullying dan Curhat Interpersonal)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 NGULING
63	MEDIA PEMBELAJARAN LOKA PHYTAGOREAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 NGULING

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
64	MONITORING SISWA (TONGSIS)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 NGULING
65	BAKMI BANG CATUR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	KECAMATAN TUTUR
66	CEKATAN (Cepat, Tanggap, Anggun)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	KECAMATAN TUTUR
67	SILAT TAAT	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	KECAMATAN TUTUR
68	INOPAMAS	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	BAPPELITBANGDA
69	APLIKASI KEMISAN MESRA	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	BAPPELITBANGDA
70	SELAMBU PERIAS	Angka Harapan hidup (AHH)	DINAS KESEHATAN
71	WaOSS TBC	Insiden Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
72	MAREM SUKO SAKANCANE	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 1. % Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 2. % Peningkatan Produktivitas Tanaman buah tahunan 3. % Peningkatan Produktivitas Tanaman sayur 4. % Peningkatan Produktivitas Tanaman Hias 5. % Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 6. % Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 7. % Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 8. % Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
		9. % Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	
73	THE SEMALAM	Persentase Jumlah Hasil Pertanian / Agribisnis yang Terstandarisasi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
74	PAGER WOJO ONLINE GAES	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	KECAMATAN WONOREJO
75	AKU BEDA APBDes SEMAR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	KECAMATAN WONOREJO
76	APLIKASI BUKU TAMU	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	DINAS KOMINFO
77	SAKTI	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	DINAS KOMINFO
78	KSATRIA BIRU	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	SATPOL PP
79	GARDA WIBAWA	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	SATPOL PP
80	M-HAVER	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SDN KRENGIH
81	GAWE TEVI-M	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SDN KRENGIH
82	CHERDAS	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 KEJAYAN
83	LENERA	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 KEJAYAN
84	LILI JELIN TENG	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 PANDAAN
85	SETIA ALAMI	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 PANDAAN
86	BUNCIRING	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 REJOSO

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
87	GERAKAN CINTA AL-QURAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 1 REJOSO
88	PANTAS	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS KRATON
89	PENTING	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS KRATON
90	CUKUR KABPAS	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	BAG. PEREKONOMIAN
91	KAMPUNG SANTRI	Persentase kejadian konflik dan potensi konflik ipoleksosbud yang ditindaklanjuti	BAKESBANGPOL
92	SIAP GRAK	INDEKS PROFESIONAL ASN	BKPSDM
93	INDIBIDUAN	INDEKS RESIKO BENCANA (IRB)	BPBD
94	PINKOPERUMIK	PERSENTASE USAHA MIKRO KECIL YANG OMSETNYA MENINGKAT	DINAS KOPERASI
95	LASKAS EMAS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dengan kriteria fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial	DINAS SOSIAL
96	E-KIR VARIAN	Persentase prasarana perhubungan yang tersedia	DISHUB
97	GETARVOS (Gerakan Pendidikan Kesenjangan Berbasis Vokasi)	INDEKS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
98	SIAPMASLAHAT	Persentase peningkatan investor	DPMPTSP
99	INTAN BERLIAN	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IPK)	DP3AP2KB
100	TARI BEPENG	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Konflik Sosial dan Kriminalitas Wilayah Kecamatan Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	KECAMATAN BANGIL
101	PRISTALTIK	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	KECAMATAN BEJI

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
102	PEMPES (Pemuda Peduli Sampah)	Persentase Desa/ Kelurahan yang aktif dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN GEMPOL
103	SEKAMPADU (Sedekah Kamis Untuk Panti Asuhan dan Dhuafa)	Persentase Desa/ Kelurahan yang aktif dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN KRATON
104	LAGACERI	Persentase Desa/ Kelurahan yang aktif dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN REJOSO
105	BULEK PRAS (Budidaya Lele Keluarga Prasejahtera)	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	DINAS PERIKANAN
106	GARDA TERAS DESA	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	DISPERPUSIP
107	NGUSAP ARIT (Ngrumat Sapi Tanpa Ngarit)	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 1. % Peningkatan Produksi Daging 2. % Peningkatan Produksi Telur 3. % Peningkatan Produksi Susu 4. % Kematian Ternak Besar 5. % Kematian Ternak Kecil 6. % Kematian Ternak Unggas	DINAS PETERNAKAN
108	GEMATI TB	Insiden Tuberkulosis	PUSKESMAS BULUKANDANG
109	PRASASTI SEHATI (Perencanaan Persalinan Resiku Tinggi Menuju Sehat Ibu dan Bayi)	Angka Kematian ibu (AKI)	PUSKESMAS GONDANGWETAN
110	KEBAS TING TING (Kedai Balita Sehat Tinggalkan Stunting)	Prevalensi Balita stunting	PUSKESMAS LUMBANG
111	RAISA MERINDU	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS RACI
112	KIC PELITA	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan	PUSKESMAS REJOSO
113	CERDAS INKLUSI (Cara Efektif baca Qur'an	Rata-rata kemampuan literasi SD	SD MUHAMMADIYAH BANGIL

NO	NAMA INOVASI (IGA 2025)	IKU OPD	OPD
	Metode Tajdied Siswa Inklusi)		
114	PMK (Perangkat Mengajar Digital) Berbasis Digital New Version	Rata-rata kemampuan literasi SD	SDN KARANGJATIANYAR II WONOREJO
115	SIPONI	Rata-rata kemampuan literasi SD	SDN KURUNG II KEJAYAN
116	BERLIAN	Rata-rata kemampuan literasi SD	SDN WONOKERTO
117	DPRD Kabupaten Pasuruan di Ujung Jari Melalui Smart Notulen	Persentase pemenuhan fasilitasi kepada DPRD	SEKWAN DPRD
118	CERMAT USWAH	Rata-rata kemampuan literasi SMP	SMPIT AL USWAH BANGIL
119	PEMBRITOJA (Pembuatan Briket Tongkol Jagung)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 PURWOSARI
120	SMART SI PINTAR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 TUTUR
121	KOMIK BELATI	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SMPN 2 PANDAAN
122	MANZILIAH ASAH KARAKTER	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SD MAARIF JOGOSARI

Berdasarkan tabel 3.6 perhitungan realisasi indikator ‘tingkat keselarasan Inovasi daerah dengan IKU dan IKD’ sebagai berikut :

$$Tk.keselaras\an\ INODA\ dg\ IKU\ PD = \frac{Jml\ Inovasi\ yg\ masuk\ di\ IGA\ selaras\ dengan\ IKU\ PD}{Jumlah\ Inovasi\ yang\ masuk\ IGA} \times 100\%$$

$$Tk.keselaras\an\ INODA\ dg\ IKU\ PD = \frac{122}{122} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 100%. Dari 122 inovasi yang masuk di IGA yang selaras dengan IKU Perangkat Daerah dibagi dengan Inovasi yang masuk IGA. Hal ini menunjukkan bahwa

inovasi daerah sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.

Inovasi daerah yang dikembangkan menjadi alat pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 400.10.11-6067 Tahun 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencapai angka 73,80 dengan predikat 'Sangat Inovatif'.

Beberapa penghargaan berkaitan dengan inovasi daerah yang diperoleh tahun 2024 pada penyelenggaraan Inotek Award dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

- Jalan Pintas (Dispendukcapil) - Kategori 1 (Inovasi Daerah) TOP 15
- SI PONI (UPT SDN Kurung II Kejayan) - Kategori 2 (Inovasi Berbasis Website/Mobile Apps) TOP 15
- Mangkas Kopi (Manfaatkan Galon Bekas Dalam Fermentasi Kopi) - Kategori 5 (Inovasi Milenial) Terinovatif 4

H. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Penilaian tahun 2025 atas SAKIP Bappelitbangda sebagai berikut:

No	Komponen SAKIP	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Kinerja	25	20
	Nilai SAKIP	100	85,25

Berdasarkan hasil tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 85,10 maka target telah dengan capaian 100,18%. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP didukung oleh tersedianya dokumen pendukung SAKIP antara lain :

1. Laporan Kinerja
2. Rencana Strategis
3. Rencana Kerja
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5. Perjanjian Kinerja
6. Rencana Aksi

7. Laporan Kinerja

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Dua Tahun Sebelumnya

Perkembangan realisasi kinerja Bappelitbangda tahun 2023-2025 tersaji dalam tabel 3.7

Tabel 3.7
Perkembangan Realisasi Kinerja Bappelitbangda
Tahun 2023-2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sat	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24,18	24,04	23,94
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	-	24,32	23,97	23,71
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah		n/a	n/a	100
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator 1.a: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	95,36	97,33
		Indikator 1b Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	%	n/a	105,86	47,77
		Indikator 1c Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	%	n/a	25	18,8
		Indikator 1d Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	%	n/a	97,50	100
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	%	n/a	100	100
		Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU Perangkat Daerah	%	n/a	n/a	100
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	-	84,60	84,95	85,25
		<i>Perencanaan kinerja (30)</i>	-	23,10	27,60	27,60
		<i>Pengukuran kinerja (30)</i>	-	27	24,60	24,90

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sat	Realisasi		
				2023	2024	2025
		<i>Pelaporan kinerja (15)</i>	-	<i>13,50</i>	<i>12,75</i>	<i>12,75</i>
		<i>Evaluasi kinerja (25)</i>	-	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

Untuk realisasi Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir tahun 2023 dan 2024 bahwa realiasi di tahun 2025 menunjukkan tren kenaikan pada masing-masing indicator tujuan dan sasaran, terdapat tambahan indicator pada tujuan yaitu Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah yang dicapai pada tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029, dan indicator sasaran Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target yang dihitung sampai pada tahun 2025 yang selanjutnya indicator tersebut tidak digunakan lagi.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029 menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja jangka menengah pada tahun 2025 atau pada tahun pertama periode 2025-2029. Hal ini menjadi acuan mengidentifikasi rumusan strategi yang tepat pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir jangka menengah dapat tercapai dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Realisasi Kinerja Th 2025
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TUJUAN : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,3	25,69	25,72	25,79	25,84	25,89	23,94
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	25,11	25,4	25,45	25,5	25,5	25,6	23,71
	Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN 1 : Meningkatnya Keselarasan dan Akuntabilitas	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen	97	98	100	100	100	100	97,33

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Realisasi Kinerja Th 2025
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan daerah							
	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	98	99	100	100	100	100	100
	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100	100	100	100	100	100	47,70
SASARAN 2 : Meningkatnya riset dan inovasi dalam rangka mendukung kinerja pembangunan daerah	Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	85,25

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dirumuskan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan perlu dilakukan upaya ekstra keras untuk tahun berikutnya, utamanya untuk indikator yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator tersebut yaitu: Nilai Sakip Komponen Perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.
2. Indikator Sasaran di tahun 2025 realisasinya telah mencapai/melebihi target akhir renstra 2025--2029, sehingga dalam penetapan target tahun berikutnya (2026) diperlukan penyesuaian atau tidak lagi mengacu pada renstra. Indikator tersebut yaitu : Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Provinsi /Standar Nasional.

Indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan yang dapat diperbandingkan dengan realisasi Provinsi Jatim dan standar nasional yaitu indikator

yang berkaitan dengan penilaian implementasi AKIP tingkat pemda, karena baik penilaian provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan oleh KemenPAN-RB. Sedang penilaian AKIP pada level PD dilakukan oleh Inspektorat Daerah masing-masing Pemda. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel 3.9. Berdasarkan tabel 3.9 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan (gap) yang cukup lebar dengan standar nasional. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah masih belum baik atau memenuhi norma-norma yang ditentukan oleh KemenPAN-RB. Catatan-catatan penting atas kekurangan tersebut sebagaimana hasil evaluasi KemenPAN-RB yang diuraikan pada subbab sebelumnya.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Kinerja BAPPEDA Propinsi Jawa Timur dan Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Realisasi	Ket.	
	KemenPAN-RB	BAPPEDA Provinsi Jatim	Bappelitbangda Kab. Pasuruan	Gap thd Standar Nasional	Gap thd Prov Jatim
		2025	2025	(+/-)	(+/-)
Nilai SAKIP OPD	100	91,74	85,25	14,75	6,49

3.1.5 Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya dapat diketahui indikator kinerja yang mencapai/tidak mencapai target dan atau mengalami peningkatan/penurunan. Rekapitulasi kondisi tersebut beserta analisis keberhasilan/kegagalan disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025
Dan Upaya yang Telah Dilakuan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,3	23,94	94,62	– pohon kinerja belum tersusun dengan baik terutama dalam mengidentifikasi intermediate dan immediate outcome serta belum menunjukkan crosscutting – penentuan target pada dokumen rencana jangka menengah belum menantang.
Upaya yang telah dilakukan : melakukan verifikasi/pendampingan dokumen perencanaan kinerja (pokin, renja, perjanjian kinerja dan rencana aksi)						
2		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,11	23.71	94,42	– Formula dan definisi operasional IKU belum jelas dan spesifik – Perhitungan realisasi indikator kinerja belum didukung sistem tata kelola data yang baik sehingga keakuratan pengukuran kinerja masih diragukan.
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	100%	100%	100%	– Riset yang telah dilakukan dapat diimplementasikan pada Peraturan Daerah, SK Bupati
Upaya yang telah dilakukan : (-) melakukan revisi SK Bupati tentang IKU Pemda dan IKU Perangkat Daerah ; (-) melakukan koordinasi dalam Tim SAKIP Kabupaten beserta Dinas Kominfo untuk mengembangkan e-sakip dan koordinai dalam Tim/Forum Satu Data Kabupaten untuk mengembangkan portal satu data kabupaten						
4		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	97	97,17	101,17%	– masing-masing petugas verikator Bappelitbangda serta sudah ada pejabat yang ditunjuk sebagai supervisor pelaksanaan verikasi dokren PD. – Beragamnya kemampuan teknis petugas verifikator Bappelitbangda

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Upaya yang telah dilakukan : (-) membuat SK verifikator, supervisor dan mitra PD dalam pelaksanaan verifikasi dokren PD beserta SOPnya; (-) melakukan bimtek untuk tenaga fungsional dan strutural tentang perencanaan (-) melakukan pertemuan/diskusi yang melibatkan semua perencana dan kbid membahas tentang tema tertentu dan isu/tugas aktual.						
5		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	100	47,7	–	– Pemantauan pencapaian IKU dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah dilakukan setiap triwulan melalui aplikasi Simoneva
6		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	36,5	18,8		
Upaya yang telah dilakukan : melakukan verifikasi atas inputan Simoneva oleh PD untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data kinerja						
7		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%	– Pemutakhiran nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dimungkinkan dimutakhirkan setiap tahun oleh Kemendagri, sehingga berpotensi pada ketidakkonsistensian antara dokren jangka menengah dan tahunan.
Upaya yang telah dilakukan : meminta PD melakukan pemetaan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan beserta indikatornya pada dokumen renja PD						
8		Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	100%	100%	100%	– Setiap pengajuan inovasi dilengkapi dengan dokumen proposal/profil inovasi yang antara lain memuat dampak/manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah
9		Tingkat Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU Perangkat Daerah	100%	100%	100%	– Pengajuan inovvasi melalui IGA yang ternyata mendukung capaian IKU Perangkat Daerah diperoleh dengan nilai yang sangat inovatif
Upaya yang telah dilakukan :melakukan pendampingan/desk dalam penyusunan dokumen pengajuan/proposal inovasi yang akan dilaporkan atau diinput ke aplikasi IGA kemendagri						

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
8		Nilai SAKIP OPD	85,10	85,25	–	– data realisasi kinerja akuntabel
Upaya yang telah dilakukan : telah menyusun kertas kerja perhitungan IKU dalam format exel secara sederhana sehingga mudah diaplikasikan						

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja (membandingkan % capaian kinerja dibagi % capaian anggaran)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, pembiayaan (anggaran) serta sarana dan prasarana. Dalam penggunaan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan melaksanakan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yaitu tujuan dan sasaran sesuai renstra PD. Efisiensi penggunaan anggaran/dana disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Tujuan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)	Ket
			Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)		
	TUJUAN : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset serta inovasi dalam mendukung kebijakan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,3	23,94	94,62	14.445.537.059	12.806.144.813	88,65	108,68	Sangat efisiensi
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	25,11	23,71	94,42					
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	100	100	100					
1	Sasaran 1 : Meningkatkan perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	97%	97,33%	97,33%	2.003.369.765	1.947.221.179	97,20%	100,13%	Sangat efisiensi
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	100%	47,70%	47,70%	3.020.138.389	2.457.854.996	81,38	76,72	Efisien
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	35,5%	18,8%	100%					
		Tingkat keselarasan antar dokrenda	98%	100%	102,04%					
2	Sasaran 2 : Meningkatkan inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	100%	100%	100%	1.272.252.000	1.264.931.144	99,42%	100,58%	Sangat efisiensi
		Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU PD	100%	100%	100%					
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,10%	85,25%	100,17%	7.611.134.985	6.699.116.805	88,02%	113,80%	Sangat Efisiensi
	JUMLAH				93,628	14.445.537.059	12.806.144.813	88,651	105,6%	Sangat Efisiensi

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.10 pada :

- a. Indikator Tujuan terdapat efisiensi sebesar 108,68 %
- b. Indikator Sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif terdapat efisiensi sebesar 76,72%
- c. Indikator Sasaran Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah terdapat efisiensi sebesar 100.58

Secara keseluruhan persentase efisiensi sumber daya pada tujuan dan sasaran pada BAPPELITBANGDA sebesar 105,6 (sangat efisien)

3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Berdasarkan uraian data kinerja dan keberhasilan/kegagalan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan pada subbab-subbab sebelumnya dapat dirumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bappelitbangda dilaksanakan berkelanjutan baik melalui bimtek maupun diskusi internal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi serta pemanfaatan riset dan inovasi.
2. Pendampingan kepada perangkat daerah, unit kerja, lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah.
3. Peningkatan pengelolaan/manajemen data kinerja Bappelitbangda dengan sistem yang lebih baik.
4. Peningkatan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Keterbukaan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder/Masyarakat/dunia usaha/industri dalam rangka pendukung capaian IKU dan IKD antara lain pengelolaan CSR dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan karena terbatasnya kapasitas riil anggaran daerah atau APBD.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Bappelitbangda tahun 2025 sebesar Rp.13.457.483.750 dan terealisasi sebesar Rp.12.577.374.566 atau tercapai 93,46% dengan rincian sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%
PERENCANAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.611.134.985	6.695.788.643	87,97
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.863.500	152.628.574	98,56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.603.200	13.641.935	87,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.035.000	131.836.930	99,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.225.300	7.149.709	98,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.214.145.085	5.425.220.659	87,30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.902.233.837	5.136.888.584	87,03
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.391.248	182.232.075	90,49
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.520.000	106.100.000	96,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.000.000	48.958.570	99,92
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.000.000	48.958.570	99,92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.900.000	15.775.000	99,21
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.900.000	15.775.000	99,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.291.250	520.874.916	98,78
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.243.500	20.397.605	87,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.615.750	52.524.243	96,17
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.578.000	57.327.225	97,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	10.820.000	98,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.854.000	379.805.843	99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.422.000	66.719.998	92,13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.422.000	66.719.998	92,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.008.350	149.348.838	65,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.100.000	128.148.838	67,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.908.350	21.200.000	57,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.504.800	316.262.088	90,49

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.798.800	267.085.408	92,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.206.000	9.786.200	53,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.500.000	39.390.480	90,55
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.020.138.389	2.457.854.996	81,38
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.136.799.500	1.748.032.987	81,81
Pelaksanaan Konsultasi Publik	156.500.000	156.030.200	99,70
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	217.587.000	138.092.000	63,47
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	607.624.000	299.441.800	49,28
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.633.000	15.425.000	98,67
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	1.357.042.500	1.277.135.987	94,11
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	21.376.000	11.122.991	52,03
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.376.000	11.122.991	52,03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	861.962.889	698.699.018	81,06
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	57.226.000	44.924.775	78,50
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	804.736.889	653.774.243	81,24
POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.003.369.765	1.947.221.179	97,20
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.199.826.500	1.108.306.678	92,37
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57.900.000	56.485.952	97,56
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.094.000	104.503.748	98,50
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	173.442.500	165.953.152	95,68

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36.000.000	35.371.697	98,25
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	277.856.000	271.598.207	97,75
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	548.534.000	474.393.922	86,48
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	824.583.450	776.898.334	94,22
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.121.800	22.194.398	95,99
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	260.320.000	257.415.707	98,88
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	135.570.000	128.636.328	94,89
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	31.865.300	30.898.463	96,97
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.556.350	115.821.441	84,82
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	237.150.000	221.931.997	93,58
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	517.601.735	502.765.018	97,13
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.765.900	6.991.286	90,03
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.583.150	65.860.013	97,45
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	21.925.085	19.898.827	90,76
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.924.600	6.558.721	94,72
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	157.411.600	155.888.852	99,03

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	255.991.400	247.567.319	96,71
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.272.252.000	1.264.931.144	99,42
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	598.898.000	598.739.390	99,97
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	598.898.000	598.739.390	99,97
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	338.734.000	336.523.198	99,35
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	338.734.000	336.523.198	99,35
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.620.000	329.668.556	98,52
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	131.320.000	128.382.000	97,76
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	203.300.000	201.286.556	99,01
JUMLAH ANGGARAN	14.445.537.059	12.806.144.813	88,65

Realisasi Anggaran :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan dengan anggaran Rp. 7.611.134.985 realisasi sebesar Rp. 6.695.788.643 dengan capaian 87,97 %. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaiannya hanya 65,50 dikarenakan pada pembayaran internet dialokasikan lebih besar, namun realisasinya kecil dan perkiraan terdapat pemnayaran untuk tenaga outsourcing ternyata tidak dipergunkan.
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian anggaran 81,38 %, realisasi kecil ada di Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota dengan capaian realisasi 49,28% dikarenakan belanja Souvenir yang sesuai dengan Realisasi riil. Beberapa kegiatan terlaksana dengan baik dalam rangka mendukung Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, kegiatan Penyusunan Penetapan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKPD Tahun 2026.
3. Pogram Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 97,20% keberhasilan pada realiasi koordinasi dengan Perangkat Daerah

terkait penyusunan Dokrenda Renja 2026, Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja 2025.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian 99,42% kegiatan penyusunan dokumen kajian penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sesuai target dengan anggaran yang cukup dimulai dari penyusunan dan kegiatan Lomba Inovasi Daerah berjalan dengan baik, untuk menjaring Inovasi-inovasi dari masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 3 tentang akuntabilitas kinerja Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja atas target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 dengan rincian:
 - Nilai SAKIP komponen perencanaan, capaian 94,62%
 - Nilai SAKIP komponen pengukuran, capaian 94,42 %.
 - Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, capaian 100,17%.
 - Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah, capaian 47,70%
 - Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target, capaian 155,1%
 - Tingkat keselarasan antar dokrenda, capaian 100%.
 - Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD, capaian 100%
 - Nilai SAKIP PD, capaian 100,17%.
 -

4.2 Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan dan analisis kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 atas laporan kinerja dapat dirumuskan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bappelitbangda dilaksanakan berkelanjutan baik melalui bimtek maupun diskusi internal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah (termasuk pendampingan perencanaan perangkat daerah), pengendalian, dan evaluasi serta pemanfaatan riset dan inovasi, yang dilakukan secara sinergi dengan perangkat daerah.
2. Pendampingan kepada perangkat daerah, unit kerja, lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah.

3. Peningkatan pengelolaan/manajemen data kinerja Bappelitbangda dengan sistem yang lebih baik.
4. Peningkatan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Hilirisasi perencanaan pembangunan daerah sampai pada pelaksanaan pembangunan untuk memastikan program prioritas pembangunan daerah dapat dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Upaya hilirisasi perencanaan antara lain melalui optimalisasi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan karena terbatasnya kapasitas riil anggaran daerah atau APBD.

Operasionalisasi seluruh rangkaian rekomendasi tersebut ditentukan oleh komitmen bersama baik secara eksternal dengan pemangku kepentingan, maupun internal Bappelitbangda mulai dari Pimpinan, pejabat struktural, fungsional, hingga staf pelaksana. Dengan komitmen yang kuat dan konsisten dalam penyusunan perencanaan, maka akan terwujud perencanaan yang efektif dan akuntabel serta berkelanjutan.

Pasuruan, 31 Desember 2025



KETUA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741031 199311 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM**

Jabatan : **KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. PASURUAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.**

Jabatan : **Pj. BUPATI PASURUAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	- -	25,30 25,11
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	1.a Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 1.b. Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah 1.c Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target 1.d Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persen Persen Persen Persen	100 100 36,50 100
2.	Meningkatnya inovasi daerah dalam kinerja mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	Persen	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	-	87

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.273.679.870	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.910.400.000	APBD
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.515.000.000	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.444.671.347	APBD

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM**

Jabatan : **KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. PASURUAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO**

Jabatan : **BUPATI PASURUAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

BUPATI PASURUAN

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741031 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24.46
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	-	24,35
		Persentase Riset yang mendukung kebijakan daerah	%	100
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	1.a Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97
		1.b Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persen	98
		1.c. Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	Persen	100
		1.d Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	Persen	36,50
2.	Meningkatnya inovasi daerah yang mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	Persen	100
		Persentase Inovasi yang Mendukung IKU Perangkat daerah	Persen	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	-	85,10

Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan berikut Matrik Tindak lanjut dari LHE SAKIP 2025, dengan beberapa perbaikan yang sedang dan dilaksanakan oleh Bappelitbangda

Tabel 1.7
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA agar dapat melakukan perbaikan yaitu hendaknya dalam melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi E-SAKIP)	Dalam melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja akan kami manfaatkan Aplikasi e SAKIP namun sampai saat ini e SAKIP masih belum optimal dalam melakukan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga kami juga masih menunggu jalannya aplikasi tersebut	Pengukuran Kinerja ASN Bappelitbangda	Desember 2025	Sekretaris BAPPELITBAN GDA	Proses

4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,95	85,25

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, hal

yang perlu diperhatikan yaitu pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP) namun belum maksimal.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan perbaikan yaitu hendaknya dalam melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 85,25 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.



Pemberian Penghargaan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI.



Penghargaan Inovasi KOVABLIK dari Priovinsi Jawa Timur



Pemberian Penghargaan dari Gubernur Jawa Timu